



Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Padang (Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)

*Regional Financial Policy and Management at BPKAD Kota Padang
(Implementation of the Use of Regional Financial Management Information System)*

1) Citra Rosika, 2) Aldri Frinaldi S, 3) Asnil, 4) Nora Eka Putri

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Email: ¹⁾ citra.rossika.chaniago@gmail.com, ²⁾ aldri@fis.unp.ac.id, ³⁾ asnilmelayu@gmail.com ⁴⁾ noraekaputri@fis.unp.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Citra Rosika

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan manajemen keuangan daerah di Indonesia melalui peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Fokusnya adalah implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagai langkah awal menuju kebijakan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif, studi literatur dilakukan untuk memahami dasar teoritis dan pengalaman terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, sikap positif dari pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi SIMDA. Pada implementasi SIMDA di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada hasil yang memuaskan. Meskipun beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet teridentifikasi, komitmen karyawan dan kesesuaian antara penempatan dengan kompetensi memberikan dukungan penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIMDA, ketika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki kebijakan dan manajemen keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan; Sistem Informasi; BPKAD

ABSTRACT

This research explores regional financial policy and management in Indonesia through government regulations governing regional finance. The focus is on the implementation of the Regional Financial Information System (SIMDA) as a first step towards better financial policy and management. This study aimed to assess the effectiveness of using SIMDA by considering four key success factors: communication, resources, attitude of implementers, and bureaucratic structure. This research method is qualitatively descriptive, a literature study is conducted to understand the theoretical basis and previous experience. The results showed that clear communication, availability of adequate human resources and technology, positive attitude of implementers, and efficient bureaucratic structure play a key role in the successful implementation of SIMDA. In implementing

SIMDA at the Regional Asset Management Agency (BPKAD) of the Padang City Government, these factors contribute to satisfactory results. Although some barriers such as internet disruption were identified, employee commitment and compatibility between placement and competence provided important support. This study concludes that SIMDA, when managed properly, can improve the quality of regional financial management. This conclusion provides insight for local governments and related institutions to continuously improve financial policy and management by utilizing information technology and strengthening the key success factors that have been identified.

Keywords: *Financial Management; Information Systems; BPKAD*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, telah berusaha untuk memaksimalkan berbagai sistem pemerintahan dari pusat hingga daerah (Mulyadi, 2013). Salah satunya yaitu keuangan daerah (Defitri, 2018). Pada masa Presiden B.J Habibie, mulai dibentuk mengenai peraturan pemerintah mengenai kebijakan keuangan negara hingga daerah seperti pemerintah kota dan kabupaten (Rohim, 2014). Salah satu kebijakan pemerintah pusat mengenai desentralisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbagai kebijaka tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem serta kebijakan keuangan daerah yang sesuai dan terintegritas dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah (Djalante, 2022).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah secara khusus mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP Nomor 108 Tahun 2000 mengenai Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mendukung serta sebagai bentuk realisasi undang-undang sebelumnya mengenai keuangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah serta kebijakan dan manajemen keuangan daerah, maka diperlukan perubahan administrasi keuangan daerah secara manual menjadi sistem akuntansi sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2022 sebagai langkah awal dalam perubahan kebijakan dan manajemen keuangan daerah menjadi lebih baik (Binawati & Nindyaningsih, 2022). Menurut Djalante, (2022), perubahan sistem ini dapat digunakan sebagai upaya dalam memperbaiki sistem kebijakan dan manajemen keuangan daerah agar sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Danang Sunyoto & SE, 2014).

Daerah dengan otoritas penuh untuk mengelola keuangannya, wajib menggunakan teknoligi informasi dalam melakukan pengelolaan transaksi akuntansi serta proses pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SEMBEL et al., 2019). Selain penggunaan sistem informasi keuangan menggunakan teknologi yang lebih modern, diperlukan adanya pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja, transparansi serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (SEMBEL et al., 2019). Pemerintah juga telah memberikan arahan mengenai proses pengelolaan keuangan daerah seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta sistem pertanggungjawaban laporan keuangan (Nurillah & Muid, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah melalui APBD harus dikelola secara baik dan berdasarkan atas sistem pengendalian internal yang berlaku. Menurut (SEMBEL et al., 2019), pemerintah daerah dapat menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melakukan pengendalian internal dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan standar akan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah (SEMBEL et al., 2019). Salah satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) (Nugraha, 2013). Salah satu keunggulan dalam penggunaan SIMDA yaitu sebagai salah satu sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan serta menggunakan media teknologi yang terintegritas (Pratama, 2017). Penggunaan SIMDA secara tepat dapat membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel serta dapat dipercaya.

Melakukan penyusunan laporan keuangan, setiap pemerintah daerah harus menggunakan standar akuntansi pemerintah. Penggunaan standar akuntansi pemerintah pada pengelolaan kebijakan dan manajemen keuangan daerah dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan (Albugis, 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta akan mendapatkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Opini yang diberikan oleh BPK akan menunjukkan tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah (Albugis, 2016).

Pengelolaan kebijakan dan manajemen keuangan daerah harus sesuai dengan asas yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yaitu efektif, akuntabel, efisien, ekonomis dan tertib (Albugis, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kebijakan dan manajemen keuangan daerah melalui peraturan pemerintah yang mengatur mengenai keuangan daerah. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

Keuangan daerah merupakan keseluruhan hak yang dimiliki oleh pemerintah dalam satuan uang, baik dalam bentuk satuan kekayaan maupun kewajiban yang harus diselesaikan (Albugis, 2016). Kebijakan keuangan daerah merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan berdasarkan pada undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah (Tahir, 2023). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan pada undang-undang yang mengatur agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Menurut Albugis, (2016) pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam mengelola uang atau anggaran pemerintah.

Manajemen keuangan daerah dapat dilakukan menggunakan sebuah sistem informasi manajemen yang dapat mengelola keuangan daerah secara terintegritas (Hidayat, 2021). Sistem informasi manajemen merupakan sebuah proses input informasi dilakukan pada suatu sistem, diproses dan disimpan hingga menyajikan sebuah laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Sunyoto, 2014). Sedangkan menurut Sembel et al., (2019) manajemen keuangan daerah menggunakan sistem informasi manajemen merupakan gabungan dari manusia serta teknologi untuk menyajikan

sebuah informasi manajemen untuk membuah keputusan organisasi. Salah satu sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu SIMDA. SIMDA atau Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Sembel et al., (2019) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Melalui penggunaan SIMDA pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah secara terintegritas pada setiap tahapan pengelolaan (Gunadi, 2017). Tahapan pengelolaan keuangan daerah dapat dimulai dari penganggaran biaya atau belanja daerah, proses tata usaha atau penggunaan dana, serta pembuatan dan penyampaian laporan keuangan daerah. SIMDA digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan serta pengelolaan keuangan yang dimiliki untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Penelitian ini didasari oleh penelitian dari Haniffullah et al., (2020) yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan manajemen keuangan daerah pasca reformasi masih menemui banyak masalah disamping memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengukur sejauh mana implementasi SIMDA, berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2005, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meneliti faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan SIMDA dengan mempertimbangkan empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Manfaat penelitian pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem keuangan daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek bersifat alamiah, serta variable yang bersifat dependen dan independen tanpa membuat perbandingan (Sugiyono, 2018). Metode penelitian ini menggunakan jurnal dan beberapa literatur yang sesuai sebagai dasar dalam penyusunan. Metode penyusunan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari beberapa literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat. Metode analisis deskriptif kualitatif pada penelitian terdahulu dilakukan dengan cara membandingkan metode penelitian, teknik pengambilan sampel, dan sumber data dari beberapa literatur. Beberapa dari metode penelitian yang ada, metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan studi literatur sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan laporannya.

Studi literatur ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menggunakan artikel ilmiah serta buku dan pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan serta menggunakan informasi yang relevan dari literature tersebut, mengkaji teori-teori dasar yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga diharapkan dengan penggunaan studi literatur dapat membantu serta mempermudah peneliti dalam menganalisa

dan memaparkan hasil dari penelitian masalah yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Padang yang telah menggunakan SIMDA. Kantor BPKAD Kota Padang berada di Jalan Prof. M. Yamin, SH. nomor 70 Kota Padang Sumatera Barat. Fokus penelitian ini diutamakan pada implementasi SIMDA pada BPKAD Kota Padang menggunakan empat faktor keberhasilan kebijakan penggunaan SIMDA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan kebijakan dan manajemen keuangan menggunakan SIMDA dapat dilakukan dengan memaksimalkan empat faktor yang dapat digunakan sebagai indikator atau alat ukur untuk menentukan efektifitas penggunaan SIMDA. Faktor keberhasilan ini sesuai dengan kebijakan yang diutarakan oleh EDWARD III, (1980). Faktor keberhasilan tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam faktor keberhasilan penggunaan SIMDA berupa kejelasan mengenai tanggung jawab atau kebijakan yang akan dilakukan secara tepat kepada setiap pelaksana (Tahir, 2023). Komunikasi dapat dilakukan pada setiap elemen fungsional atau setiap individu dalam pemerintahan. Komunikasi harus dilakukan secara jelas untuk menghindari adanya kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab yang dimiliki. Komunikasi dapat dikatakan terlaksana apabila setiap staff atau pelaksana dapat memahami arti serta tujuan dari penggunaan SIMDA.

Komunikasi yang dilakukan pada lingkup pemerintah Kota Padang telah diberikan oleh pimpinan atau kepala divisi kepada setiap staff mengenai instruksi penggunaan SIMDA. Penyampaian perintah dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan secara rutin atau melalui buku panduan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, hambatan yang seringkali ditemui dalam penggunaan SIMDA yaitu masih sering terjadi gangguan pada jaringan internet. Menurut Sembel Et al., (2019), komunikasi yang dilakukan pada implementasi SIMDA harus dapat menyampaikan pesan atau makna secara jelas.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan implementasi SIMDA, diperlukan adanya pelaksana atau sumber daya yang memadai. Menurut Tahir, (2023), sumber daya yang terdapat dalam organisasi merupakan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan setiap elemen tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Kemampuan yang dapat dimiliki oleh pelaksana dapat terdiri dari komitmen, kemampuan pengelolaan sumber daya yang tersedia, otoritas, serta kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasinya.

Selain dari dalam diri pelaksana kebijakan, sumber daya dapat berasal dari pendanaan dan peralatan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan SIMDA. Sumber daya manusia di BPKAD Kota Padang sudah cukup mencukupi. Namun, salah satu hambatan yang ditemui pada BPKAD Kota Padang yaitu pemaksimalan atau penempatan setiap karyawan masih belum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Fasilitas yang baik akan membantu dalam pelaksana memaksimalkan implementasi SIMDA dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang baik dan dapat dipercaya. Keahlian yang dimiliki oleh setiap pelaksana juga menjadi salah satu sumber daya pendukung dalam implementasi SIMDA.

3. Sikap Pelaksana

Implementasi pelaksanaan SIMDA dapat dinilai maksimal apabila setiap elemen pelaksana kebijakan dapat berjalan secara baik. Pelaksanaan kebijakan yang baik dapat dilihat melalui manfaat

yang diterima oleh pelaksana. Penggunaan SIMDA secara maksimal dapat membantu pelaksana untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Penggunaan SIMDA dapat membantu menyelesaikan tugas secara cepat, tepat waktu dan laporan yang dihasilkan akurat serta relevan.

Menurut Tahir, (2023), pelaksanaan kebijakan penggunaan SIMDA harus dilakukan secara efektif yang dapat didukung oleh keinginan kuat setiap pelaksana. Pada BPKAD Kota Padang seluruh karyawan telah menerima dan memahami terkait penggunaan SIMDA. Selain itu, dalam pelaksanaan SIMDA seluruh karyawan telah memberikan komitmen, integritas serta sinergi dalam memaksimalkan implementasi SIMDA. Setiap elemen pelaksana harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. Kemauan tersebut dapat ditunjukkan dengan melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara baik dengan tetap menjunjung tinggi nilai nilai profesionalitas, integritas dan komitmen dalam pelaksanaan.

4. Struktur Birokrasi

Untuk memaksimalkan implementasi SIMDA pada pemerintah daerah, diperlukan adanya struktur birokrasi atau pembagian tugas yang jelas. Menurut Tahir (2014), struktur birokrasi yang jelas dapat membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak efisien, akan menghambat adanya implementasi SIMDA meskipun faktor lain sudah dilakukan secara maksimal. Kejelasan dalam pembagian tugas setiap elemen, akan meminimalisir adanya pengerjaan berulang atau kesalahan penggunaan SIMDA.

Pada BPKAD Kota Padang, terdapat pembagian wewenang, tugas serta hak pada setiap elemen pelaksana kebijakan SIMDA. Selain itu, terdapat prosedur yang disusun dalam SOP untuk memaksimalkan struktur birokrasi dalam menggunakan SIMDA. SOP yang jelas dapat membantu setiap pelaksana kebijakan dalam menggunakan SIMDA secara maksimal. Pelaksanaan kebijakan menggunakan SOP yang jelas dapat berjalan secara efektif dan efisien yang akan menghasilkan output yang baik dan sesuai.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kebijakan dan manajemen keuangan daerah melalui peraturan pemerintah yang mengatur mengenai keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) secara maksimal dapat menghasilkan output atau laporan yang dapat dipercaya, transparan dan akuntabel. Terdapat empat faktor yang dapat mendukung keberhasilan SIMDA yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Setiap faktor saling berhubungan dan harus dipenuhi untuk memaksimalkan penggunaan SIMDA pada pemerintah daerah. Terdapat pembagian wewenang, tugas serta hak pada setiap elemen pelaksana kebijakan SIMDA pada BPKAD Kota Padang. Selain itu, terdapat prosedur yang disusun dalam SOP untuk memaksimalkan struktur birokrasi dalam menggunakan SIMDA. SOP yang jelas dapat membantu setiap pelaksana kebijakan dalam menggunakan SIMDA secara maksimal. Pelaksanaan kebijakan menggunakan SOP yang jelas dapat berjalan secara efektif dan efisien yang akan menghasilkan output yang baik dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19–39.
- Danang Sunyoto, S. H., & Se, M. M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen (Perspektif Organisasi)*. Media Pressindo.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Djalante, A. (2022). Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan: Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. *Seiko: Journal Of Management & Business*, 5(1), 685–697.
- Edward Iii, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gunadi, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Haniffullah, A., Bangsa, I. A., & Stefanie, A. (2020). Implementasi Quadcopter Pembawa Arm Robot Pembersih Kaca Jendela Gedung Bertingkat. *Edu Elekrika Journal*, 9(2), 36–42.
- Hidayat, A. K. (2021). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Dalam Melaksanakan Refocussing Dan Realokasi Anggaran Di Bpkad Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. Ipdn Jatinangor.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Nugraha, H. A. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupanten Nganjuk)*. Universitas Negeri Malang.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Pratama, S. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative*
-

^{1*) Citra Rosika,} ^{2) Aldri Frinaldi S,} ^{3) Asnil,} ^{4) Nora Eka Putri}

Regional Financial Policy and Management at BPKAD Kota Padang (Implementation of the Use of Regional Financial Management Information System)

Reform, 4(2), 153–169.

Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justisia, 8(1), 80–97.*

Sembel, F., Posumah, J., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Suatu Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik, 5(67).*

Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D. *Alfabeta, Bandung.*

Tahir, A. (2023). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Paten, 8(89).*



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).